



BUPATI SIKKA

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 125-q /HK/2009

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMK NEGERI 2 MAUMERE KABUPATEN SIKKA

BUPATI SIKKA,

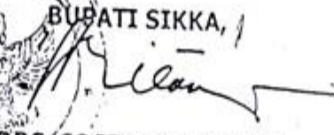
- Menimbang :
- a. bahwa setiap sekolah harus ada Ijin Operasional oleh pejabat yang berwenang sebagai legalitas penyelenggaraannya;
 - b. bahwa SMK Negeri 2 Maumere memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002;
 - c. bahwa sehubungan dengan point a diatas, maka legalitas SMK Negeri 2 Maumere perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 7 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sikka Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Seri A Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Maumere Kabupaten Sikka Bidang Kelautan dan Perikanan, mulai Tahun Ajaran 2009/2010.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka dan Subsidi lain yang sah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 20 Mei 2009

BUPATI SIKKA,

DRS. SOSIMUS MITANG

NO.	PENGOLAH DAN PEJABAT	TGL	PARAF
1.	PENGETIK	24/05/2009	
2.	KASUBAG ATAS KASIE	23/05/2009	
3.	KATUJAL S. PIN	21/05/2009	